

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

**ALICIA SALSABILAH**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

**Sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Disusun dan diajukan oleh :

**ALICIA SALSABILAH  
A011171532**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh :

**ALICIA SALSABILAH**  
**A011171532**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 April 2022

Pembimbing I



**Dr. Agussalim, SE., M.Si.**  
**Nip : 19670817 199103 1 006**

Pembimbing II



**Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.**  
**Nip : 19590303 198810 1 001**

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Drs. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CESF., CWM®**  
**Nip 19690413 199403 1 003**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**ALICIA SALSABILAH**  
**A011171532**

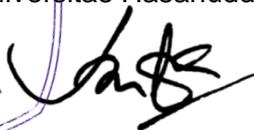
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **1 April 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. A. Baso Siswasharma, M.Si.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., MSi., CSF., CWM	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sanusi Fattah., SE.,M.Si.,CSF.,CWM®**  
**Nip : 19690413 1994031 003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alicia Salsabilah  
Nomor Pokok : A011171532  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Hasanuddin  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

  
Alicia Salsabilah

A011171532

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”** dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, dan masukan dari orang-orang sekitar penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, izinkan saya sebagai penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua penulis, untuk Ayahanda Mursalim, dan ibunda Hamsiah yang selalu mendoakan dan membimbing anaknya dengan sepenuh hati. Terimakasih atas kepercayaan penuh yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan kepenulisan ini dengan baik,
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Agussalim, SE., MSi. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, MSi. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala masukan, arahan, nasihat, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si. dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM. Selaku dosen penguji, Terima kasih atas segala masukan dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan.
6. Ibu Dra. Fatmawati, M.Si. selaku penasihat akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya terkait masalah akademik selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai akademik dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terkhusus untuk Pak Aspar, Pak Rahim, Pak Safar, Ibu Ida dan yang belum sempat disebutkan.

Terima kasih atas bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan ujian dengan baik.

9. Teman-teman pengurus UKM Bola Basket UNHAS dan khususnya kepada UKM Bola Basket UNHAS.
10. Teman-teman PEKSBUT ku, terima kasih untuk semua momen kebersamaan yang telah dilalui bersama-sama. Rasa syukur diberikan kepada penulis karena telah dipertemukan dengan mereka.
11. Teman-teman MAWAR yang tersayang, Hj. Zahranillah Sukman, ST. dan Fauziah Dea Ramadhani. Terimakasih untuk kebersamaan yang telah dilalui, susah senang selalu bersama, harapan yang sangat besar diberikan kepada kalian dari penulis, semoga kita semua bisa sukses bersama-sama.
12. Teman-teman TERAS yang tergoxil, Karina Karman, Isratilla Natasya, Alif Thariq Sutrisno, Khairul Takbir, Aldizqi Feriratama, Naufal, dan Yustira Aditya, terimakasih atas semua cerita-cerita yang pernah dilalui bersama.

Makassar, 19 April 2022

Penulis,



**Alicia Salsabilah**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**

**Alicia Salsabilah  
Agussalim  
Bakhtiar Mustari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor jumlah penduduk, inflasi, produk domestik regional bruto, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Temuan dari penelitian ini adalah Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Makassar. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Makassar. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

**Kata Kunci : Jumlah penduduk, inflasi, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan PAD.**

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Factors Affecting Regional Original Income In Makassar City***

**Alicia Salsabilah  
Agussalim  
Bakhtiar Mustari**

*This study aims to determine the effect of population factors, inflation, gross regional domestic product, and government spending on local revenue in Makassar City. The analytical method used in this research is multiple regression analysis. The findings of this study are the number of residents has a negative and significant effect on PAD in Makassar City. Inflation has a positive and significant effect on PAD in Makassar City. GRDP has a positive and significant impact on PAD in Makassar City.*

**Keywords:** *Population, inflation, GRDP, government spending, and PAD.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	8
2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.2 Konsep Jumlah Penduduk .....	14
2.1.3 Konsep Inflasi .....	15
2.1.4 Konsep Indikator Inflasi .....	22
2.1.5 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	22
2.1.6 Konsep Metode Perhitungan PDRB .....	25
2.1.7 Konsep Pengeluaran Pemerintah .....	28
2.1.8 Hubungan Antara Variabel .....	30
2.2. Penelitian Terdahulu .....	34
2.3. Kerangka Koseptual .....	37
2.4. Hipotesis.....	38

BAB III	METODE PENELITIAN .....	39
3.1.	Rancangan Penelitian .....	39
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
3.3.	Populasi dan Sampel .....	39
3.4.	Jenis dan Sumber Data .....	39
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6.	Analisis Data .....	40
3.7.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.2.	Hasil Penelitian .....	47
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
BAB V	PENUTUP .....	68
5.1.	Kesimpulan .....	68
5.2.	Saran-saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA	.....	70
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2020 ..... 5
1.2.	Data Jumlah Penduduk dan Inflasi Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2020 ..... 5
4.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2017..... 46
4.2.	Data Jumlah Penduduk, Inflasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2011-2020 ..... 48
4.3.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Makassar Tahun 2011-2020 49
4.4.	Pertumbuhan Tingkat Inflasi Kota Makassar Tahun 2011-2020 ..... 50
4.5.	Pertumbuhan PDRB Kota Makassar Tahun 2011-2020..... 51
4.6.	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Kota Makassar Tahun 2011-2020..... 52
4.7.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2011- 2020 ..... 53
4.8.	Statistik Deskriptif ..... 54
4.9.	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test ..... 55
4.10.	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 56
4.11.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser ..... 57
4.12.	Hasil Uji Autokorelasi ..... 58
4.13.	Hasil Olahan Data Regresi dan Korelasi..... 60
4.14.	Uji Koefisien Determinasi..... 61
4.15.	Hasil Uji Anova..... 63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Data Investasi Swasta, Investasi Pemerintah, IPM dan Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2018.....	65
2.	Hasil Olahan Data SPSS .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004). Oleh karena itu perlu ditingkatkan sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Masalah PAD berkaitan dengan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2014). Pengelolaan dan pengembangan potensi PAD merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan (Suhendi, 2007).

Pentingnya fungsi dan peran PAD dalam membiayai pembangunan daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu

mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan PAD terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang negara lain, dan potongan, komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber PAD-nya, karena PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri. Meningkatkan PAD dapat membantu pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Usaha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dapat tercapai dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat terwujud melalui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah yang dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dll.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD

terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya jumlah penduduk, inflasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat.

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejolak ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun.

Faktor lain yang mempengaruhi PAD adalah PDRB. PDRB atau pendapatan perkapita yang merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi. Pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian. Ini berarti bahwa semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan PAD.

Salah satu faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi PAD adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dengan melalui beban pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pengeluaran Pemerintah termasuk dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Apabila pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang membeli barang dan jasa, maka pengeluaran daerah mencerminkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, yakni merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan sebagai kota metropolitan dan Makassar yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu stabil, sehingga dengan kestabilan ekonomi saat ini mengakibatkan pembangunan ekonomi semakin maju saat ini, namun untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Kota Makassar maka sangat perlu ditunjang oleh adanya penerimaan pajak daerah. Namun kenyataannya adalah jumlah pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan daerah belum mencapai penerimaan pajak daerah menurut target, sehingga akan disajikan capaian penerimaan pajak daerah yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang dapat ditunjukkan melalui tabel 1.1. yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2011	122.054.730.961	67.923.457.780	55,65
2012	118.863.459.472	71.092.235.110	59,81
2013	144.250.904.367	88.353.678.925	61,25
2014	113.368.155.359	70.923.118.356	62,56
2015	135.041.569.031	96.892.325.780	71,75
2016	143.182.670.000	70.635.296.440	49,33
2017	120.000.000.000	92.970.091.185	77,48
2018	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34
2019	135.000.000.000	120.487.321.549	89,25
2020	72.000.000.000	55.079.995.032	76,50

Sumber : Dispenda, 2021

Tabel 1.1 yaitu target dan realisasi PAD yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah belum memenuhi target, dimana realisasi pendapatan asli daerah yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan selain itu masih kurang efektifnya bagian penagihan untuk melakukan penagihan kepada masyarakat mengenai pajak daerah. Dan selain itu karena meningkatnya tingkat inflasi yang terjadi selama ini dan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk, hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.2 yaitu :

Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk dan Inflasi Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Inflasi (%)
2011	1.352.136	0,95	2,87
2012	1.369.606	1,28	4,57
2013	1.408.072	2,90	6,24
2014	1.429.242	1,50	8,51
2015	1.449.401	1,41	5,18
2016	1.469.601	1,39	3,18
2017	1.489.011	1,32	4,48
2018	1.480.480	1,31	3,48

2019	1.526.677	1,29	2,43
2020	1.423.877	1,23	2,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Makassar mulai dari tahun 2011 yaitu sebesar 1.352.136 jiwa sampai tahun 2020 meningkat menjadi 1.423.877 jiwa, dimana pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan per tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran yang lebih banyak dari angka kematian, umur panjang. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 1.423.877 jiwa. Perkembangan inflasi di Kota Makassar masih relatif dapat dikendalikan berdasarkan tabel inflasi bersifat fluktuatif. Namun, pada tahun 2014 inflasi mengalami peningkatan yakni, pada titik 8,51%. Namun pada tahun-tahun berikutnya laju inflasi dapat ditekan. Pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan yaitu berada pada titik 2,13% dari tahun-tahun sebelumnya, melainkan realisasi penerimaan PAD yang cenderung mengalami penurunan dan selain itu target tidak tercapai, sehingga terdapat permasalahan dengan penerimaan PAD. Berdasarkan riset gap dan permasalahan yang telah ditemukan maka hal ini menjadi alasan peneliti tertarik memilih judul penelitian: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut; Apakah jumlah penduduk, inflasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap PAD di kota Makassar ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor jumlah penduduk, inflasi, Produk domestik regional bruto, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau bahan di dalam pembelajaran, terutama literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kota Makassar

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kota Makassar, dalam upaya peningkatan pendapatan jumlah penduduk, Inflasi dan PDRB dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori dan konsep ekonomi yang berkaitan dengan fakto-faktor (variabel) yang dianalisis serta yang berkaitan dengan substansi penelitian secara keseluruhan.

##### **2.1.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Dana sumbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari : Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah (PAD) sendiri.

Menurut Darise (2018) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Supramoko (2012) PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Halim (2014) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PAD adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan

untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: "Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". PAD ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi di daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun yang menjadi sumber PAD adalah :

1. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah

daerah dan jasa usaha milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, seperti: bagian laba Bank Pembangunan daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pihak ketiga.

4. Lain-lain PAD yang sah yaitu semua PAD yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/PGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposito.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya dana penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah yaitu dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kontribusi bagi pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Dari komponen-komponen PAD di atas, penerimaan yang paling potensial memberikan kontribusi yang cukup berarti adalah penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola serta menggali sumber daya di daerah yang menjadi potensi daerah yang

menghasilkan kontribusi yang berarti bagi PAD. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah perlu melakukan upaya optimalisasi atas potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini, daerah harus mampu memanfaatkan, mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya kontribusi bagi PAD melalui upaya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kemandirian daerahnya.

### **2.1.2 Konsep Jumlah Penduduk**

Dalam teori penduduk, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan selanjutnya Malthus sangat prihatin bahwa waktu yang dibutuhkan penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Dari deret-deret tersebut terlihat bahwa akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Dalam waktu 200 tahun, perbandingan ini akan menjadi 256 : 9 (Mantra, 2000).

Pendapat Malthus ditentang oleh sarjana lain, diantaranya Michael Thomas Sadler yang mengemukakan bahwa daya produksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah maka daya reproduksi manusia akan meningkat. Juga Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi

penduduk berbanding berbalik dengan bahan makan yang tersedia (Mantra, 2000).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001).

Ada beberapa hal yang bisa jadi penghambat laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 1. *Positive checks* atau kejadian yang berada diluar kekuasaan manusia seperti, bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang dan pembunuhan. 2. *Presentive checks* atau hal yang bisa diusahakan oleh sendiri seperti, menunda perkawinan atau pernikahan dan manusia selibat permanen (Malthus, 2010).

### **2.1.3 Konsep Inflasi**

Inflasi memiliki definisi yang sangat beragam yang dapat ditemukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman dari definisi inflasi ini pun terjadi karena adanya berbagai hubungan yang sangat erat antara inflasi dengan sektor-sektor perekonomian, sehingga hal tersebut menciptakan berbagai jenis pengertian maupun pandangan yang berbeda mengenai inflasi termasuk dalam menyikapi permasalahan yang disebabkan oleh adanya inflasi.

Inflasi dalam pengertian luas adalah kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan adanya mekanisme pasar. Inflasi menjadi suatu fenomena dan dilema ekonomi bagi seluruh negara karena menurunnya daya beli masyarakat akan diikuti dengan menurunnya nilai riil mata uang negara.

Para ekonom mendefinisikan inflasi secara berbeda-beda namun mempunyai inti yang sama yaitu kenaikan harga-harga yang cenderung naik secara terus menerus. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi .

Inflasi merupakan ukuran aktivitas ekonomi yang juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional, berikut ini beberapa pengertian tentang inflasi. Menurut Fahmi (2014) inflasi adalah: "Suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan"

Menurut Sukirno (2017) inflasi adalah : "Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus". Menurut Natsir (2014) inflasi adalah: "Kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus".

Berdasarkan pengertian–pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Sedangkan kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya.

Inflasi di suatu negara dapat dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Biaya Hidup, dan Indeks Harga Produsen. Rumus menghitung inflasi berdasarkan IHK adalah:

Pit adalah harga barang pada periode tertentu, Qit adalah bobot barang pada periode tertentu, Pio adalah harga barang pada periode dasar, dan Qio adalah bobot barang pada periode dasar.

Setelah mendapatkan nilai IHK, baru nilai inflasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$\text{Inflasi} = (\text{IHK periode 1} - \text{IHK periode 2}) / \text{IHK periode 2} \times 100$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai inflasi dalam suatu negara dapat diketahui dengan tepat. Jadi, saat nilai inflasi berada pada tingkat yang melebihi target, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dapat mengambil langkah tepat agar inflasi tidak semakin memburuk.

Inflasi memiliki dampak cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit belanja. Padahal motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak ke lambat atau stagnan, bahkan lebih rendah.
2. Inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan, tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama.
3. Inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya devisa jadi berkurang.
4. Inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebabnya bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di

bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tak terasa.

5. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua berkaca pada perkembangan kurs rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam mengatasi laju inflasi, biasanya pemerintah dan BI memiliki target tahunan. Tahun ini, inflasi dijaga pada level 3,5 *plus minus* 1%. Otoritas fiskal dan moneter ini bersinergi dengan mengeluarkan jurus-jurus pengendalian inflasi. Sebagai contoh, pertama sinergi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi komunikasi yang efektif. Kedua, adaptasi dalam inovasi, dan ketiga, pengembangan bisnis model kerja sama perdagangan antar daerah, serta strategi lainnya.

Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga inflasi. Salah satunya tidak berlebihan atau memborong sembako. Misalnya saat produksi bawang putih merosot, harga melonjak, kemudian masyarakat panik dan akhirnya membeli dalam jumlah banyak. Alibinya takut kehabisan. Padahal cara tersebut justru dapat mendongkrak kenaikan harga lebih tinggi karena permintaan besar. Jadi bijaklah dalam berbelanja karena pemerintah dan BI akan berupaya keras untuk menjaga inflasi sesuai target.

Inflasi tidak semata-mata terjadi begitu saja, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

## 1. Demand atau Meningkatnya Permintaan

Inflasi yang terjadi akibat meningkatnya permintaan dari masyarakat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa tertentu adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena kebutuhan-kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diminta tidak tersedia. Sementara permintaan masyarakat terhadapnya semakin tinggi, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasaran.

Tidak hanya permintaan yang tinggi dari masyarakat dalam negeri, tetapi meningkatnya permintaan barang untuk diekspor ke luar negeri juga menjadi salah satu penyebab inflasi. Selain itu meningkatnya permintaan perbelanjaan untuk pemerintah dan pihak swasta juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

## 2. Meningkatnya Biaya untuk Produksi

Inflasi yang disebabkan karena meningkatnya biaya untuk produksi. Disaat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka karena hal tersebut. Inilah faktor penyebab inflasi lainnya. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya, sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasaran.

Sehingga produksi yang dilakukan pun menjadi ikut tersendat. Tidak hanya itu, naiknya harga bahan bakar dan upah para buruh juga menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan produsen. Sehingga membuat mereka tidak bisa memenuhi permintaan di pasaran. Sementara permintaan masyarakat semakin tinggi terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Terjadilah ketidakseimbangan yang akan menyebabkan terjadinya inflasi.

### 3. Tingginya Peredaran Uang

Inflasi yang satu ini disebabkan oleh tingginya peredaran uang di masyarakat, sehingga menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat mencapai dua kali lipat. Maka bisa terjadi kenaikan pada harga-harga barang tersebut, bahkan bisa mencapai kenaikan hingga 100%. Ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Itulah alasan mengapa pemerintah tidak semata-mata mencetak uang yang banyak untuk melunasi hutang negara dan lain-lain. Karena saat jumlah uang yang beredar lebih banyak maka dapat menyebabkan terjadinya inflasi di negara tersebut.

Kenaikan suatu harga dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Adapun beberapa indeks harga yang dikenal dan sering dipakai untuk mengukur tingkat inflasi diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah suatu indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau masyarakat dalam waktu tertentu. Nilai IHK menunjukkan rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen dari sekelompok barang dan jasa tertentu. IHK merupakan indeks harga yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. IHK menunjukkan setiap pergerakan harga atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang dilakukan melalui survei di berbagai wilayah tertentu.

Adapun kegunaan dari IHK diantaranya adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai barometer nilai tukar rupiah atau sebagai indikator inflasi.
- b. Dipakai sebagai landasan untuk memperbaiki/menyesuaikan gaji dan upah karyawan.
- c. Merupakan pengukur perubahan harga konsumen.
- d. Indikator perubahan pengeluaran rumah tangga

## 2. GDP deflator

GDP deflator adalah indeks yang merupakan perbandingan antara GDP riil dan GDP nominal. GDP riil adalah nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian yang diperoleh pada saat output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Sedangkan GDP nominal adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku di pasar.

## 3. Indeks Harga Perdagangan Besar

Indeks Harga Perdagangan Besar adalah suatu indeks dari harga bahan baku, produk antara dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Sehingga indeks harga produsen hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau setengah jadi saja, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan di dalam perhitungan indeks harga.

## 4. Indeks Harga Produsen (IHP)

IHP adalah indeks yang menggambarkan perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Adapun bahan yang dibeli oleh produsen meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Dan adapun perbedaan antara IHP dengan IHK adalah kalau IHP mengukur tingkat harga pada awal sistem distribusi, IHK mengukur harga langsung

yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran. IHP biasa disebut juga indeks harga grosir .

Menurut Natsir (2014) rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}}$$

Keterangan:

$INF_n$  : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_n$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_{n-1}$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

#### **2.1.4 Konsep Indikator Inflasi**

Menurut Bank Indonesia mengemukakan bahwa Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian, Badan Pusat Statistik akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang

besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

### **2.1.5 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh PDRB atas dasar harga pasar.

PDRB adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung berdasarkan harga tahun dasar.

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk Menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB.

Dari data PDRB ini berguna untuk :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

#### **2.1.6 Konsep Metode Perhitungan PDRB**

##### **1. Metode Langsung**

###### **a. Pendekatan Produksi**

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau PDB diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian.

Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan.

b. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- 1) Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
- 2) Keuntungan perusahaan (*corporate profit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profit taxes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- 3) Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari selfemployed person, misalnya petani, self employed profesional, dan lain-lain. Dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.

- 4) Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, *rental businees* dan *recidential properties*, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- 5) Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd$$

Dimana:

$Yw$  = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

$Yi$  = Pendapatan dari bunga

$Ynr$  = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan

$Ynd$  = Pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak

#### c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau PDRB adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis

barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

## 2. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatans regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

### **2.1.7. Konsep Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek.

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2017).

Sukirno (2017) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi.

Susanti (2016) bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika

dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah setiap tahunnya, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi.

Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. "Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ . Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah". Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional.

Pengeluaran Pemerintah dapat disimpulkan sebagai tindakan maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun. Pengeluaran pemerintah merupakan unsur agregat sesuai dengan konsep perhitungan pendapatan nasional, dengan membandingkan jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional.

## **2.1.8. Hubungan Antara Variabel**

### **2.1.8.1 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan ketetapan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, peranan pajak salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Jadi apabila Jumlah Penduduk disuatu daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah, melalui pemungutan pajak dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.

Dari teori yang di kemukakan diatas mengatakan bahwa peningkatan Jumlah Penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Hasanur (2016), bahwa secara parsial jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman *et al.*, (2019) yang hasil penelitiannya

menemukan bahwa secara parsial jumlah penduduk, PDRB dan Belanja daerah secara masing masing berpengaruh terhadap PAD.

#### **2.1.8.2 Hubungan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Mankiw (2006) inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, Mankiw mengutarakan bahwa, seluruh pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang. Sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik), dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam tiga cara. Pertama, Pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Kedua, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Ketiga, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Dari itulah pemerintah dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Hubungannya adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktifitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah seperti halnya penelitian Muchtholifah (2010). Pendapatan seseorang akan menentukan inflasi, dari pengertian tersebut bahwa pendapatan seseorang yang meningkat secara nominal akan memberikan dampak peningkatan terhadap perolehan pendapatan asli daerah dan inflasi tidak dapat lepas dari adanya peningkatan upah kerja atau uang beredar di masyarakat. Semakin tinggi uang beredar dimasyarakat akan semakin tinggi

peningkatan inflasi dan akan semakin tinggi perolehan pendapatan di pemerintah daerah.

#### **2.1.8.3 Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen (dalam Mangkosoebroto, 2010) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Selain itu terdapat pula model Circular Flow.

Hubungan PDRB Konstan terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktivitas perekonomian di 9 sektor ekonomi pada daerah. Jika aktivitas ekonomi 9 sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran PAD daerah, karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan PAD secara langsung, seperti halnya penelitian Adi (2006) menyimpulkan: setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah.

#### **2.1.8.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dinikmati orang banyak. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah mengenakan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD juga meningkat.

Halim (2014:99) yang menyatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Abimanyu (2015:40) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang meningkat dan bertambahnya investor sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Pamungkas (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Peneliti memperluas pengetahuan dengan menambahkan penelitian terlebih dahulu sebagai pembanding dalam penelitiannya. Pembanding dilihat mulai dari judul penelitian, tujuan, variabel, metode, dan hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain memiliki karakteristik

yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh :

Mayza, (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. Hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05 sedangkan dari Uji t menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.

Riandani Rezki Prana (2016) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi (CONS) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, dan variabel jumlah penduduk (POP) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel Retribusi tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kota Tebing Tinggi. Model TAX menunjukkan bahwa variabel konsumsi (CONS) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel pajak daerah tahun sebelumnya (TAX1) berpengaruh positif tapi tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen. Model RET menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel jumlah penduduk (POP) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel retribusi daerah tahun sebelumnya (RET1) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen. Sedangkan pada model OTHS menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk

tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen.

Sane Bembok (2020) Analisis faktor faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolikara. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama penelitian dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) diperoleh, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hengki, *et. al.* (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika. Berdasarkan perhitungan elastisitas pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah maka, diperoleh informasi bahwa sumber pertumbuhan melalui komponen PAD yakni rerata komponen Pajak Daerah memperoleh penilaian Elastis, Retribusi Daerah memperoleh penilaian Inelastis, Laba BUMD dan Aset Daerah memiliki penilaian Unitary Elastis, dan komponen lain-lain Pendapatan Yang Sah memperoleh penilaian Elastis. Sehingga melalui informasi ini, maka sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimikadi persembahkan oleh komponen Realisasi Pajak Daerah, Laba BUMD dan Aset Daerah.

Defri Kurniawan (2018) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Bontang. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bontang sebesar 5,62 % berada dalam kategori sangat kurang ( $DDF < 10\%$ ). Investasi Swasta adalah faktor dominan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PDRB. Jumlah Penduduk dan Belanja Pembangunan Pemerintah berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap PDRB. Jumlah Penduduk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD, Belanja Pembangunan Pemerintah berpengaruh langsung namun tidak signifikan. Investasi Swasta dan PDRB berpengaruh langsung namun tidak signifikan. Jumlah Penduduk, Belanja Pembangunan Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh tidak langsung terhadap PAD melalui PDRB.

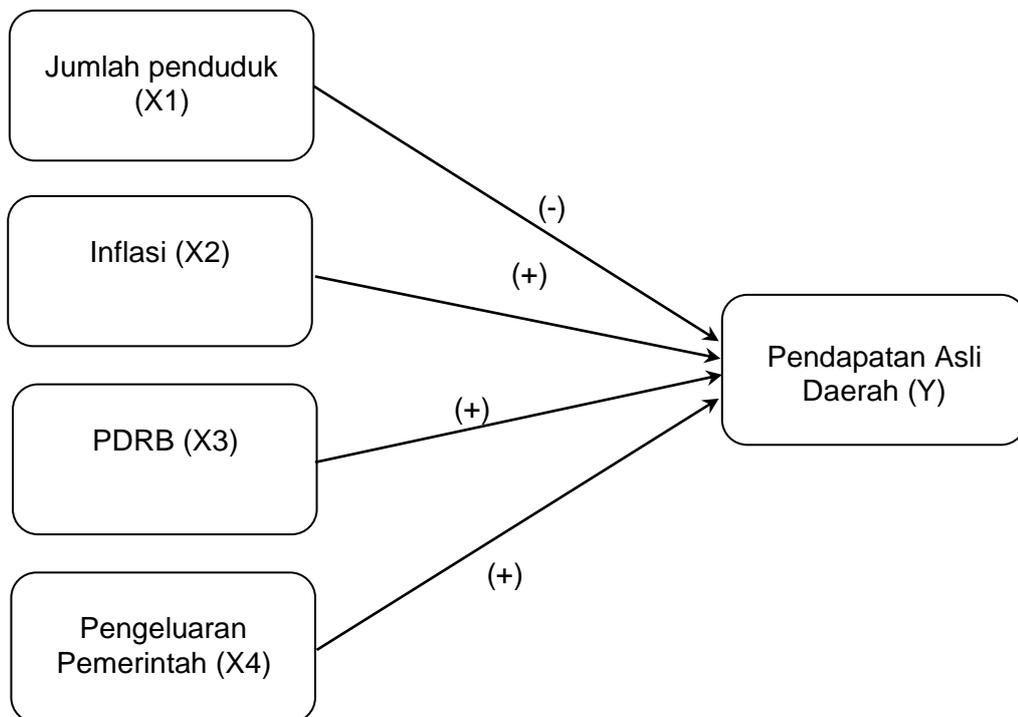
Pamungkas (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Susanti, dkk (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. Hasil pengujian parameter secara individual membuktikan bahwa kedua variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) dan pengeluaran Pemerintah Aceh ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat ( $Y$ ).

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka di atas, maka disusunlah kerangka proses berfikir. Kerangka proses berfikir dimaksudkan untuk memberikan tuntunan berfikir deduktif melalui teori yang ada, karena teori mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat dipakai pada kasus-kasus khusus.

Agar dapat lebih memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka dikemukakan gambar kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.
2. Diduga bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.
3. Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.
4. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.